

EKSISTENSI BAHASA DAERAH DI ERA DISRUPSI

Mariam Ulfa

STKIP PGRI Bangkalan

mariamulfa@stkipgri-bkl.ac.id

ABSTRAK

Bahasa bersifat dinamis dan selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Di era revolusi industri banyak perubahan-perubahan di beberapa bagian dan aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan bahasa. Era revolusi industri diikuti dengan era disrupsi yaitu pergeseran-pergeseran aktivitas dari manual menjadi robot yang serba otomatis. Tulisan ini fokus pada disrupsi bahasa dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya Indonesia termasuk salah satu Negara yang masuk dalam katagori Endoglossic yang menerapkan satu bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi pengantar dalam segala aktivitas yaitu bahasa Indonesia. Disrupsi bahasa dapat dipandang sebagai kemajuan dan dapat pula dipandang sebagai pengaruh interferensi bahasa yang tidak terelakkan. Dalam bidang seni, banyak lagu-lagu Jawa yang mulai dikenal di seluruh Indonesia melalui televise dan *youtube* sehingga yang berasal dari daerah lain dengan sengaja mencari arti dari lagu tersebut. Di dunia politik, dapat dilihat saat kampanye, calon-calon anggota legislatif dari daerah membuat jargonnya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Di bidang transportasi juga diberikan panduan berbahasa daerah. Contoh lain di bisnis kuliner, masing-masing daerah menggunakan kalimat khas daerah masing-masing yang biasanya dipopulerkan oleh *public figure* yang dikenal oleh masyarakat. Disrupsi bahasa akan menjadi bentuk dampak negatif jika berpengaruh terhadap pemertahanan bahasa daerah dan bahasa nasional yang dikhawatirkan akan ditinggalkan oleh pemakainya. Disrupsi bahasa harus dapat disikapi dengan seimbang agar tidak mempengaruhi ekologi bahasa.

Kata Kunci: *eksistensi bahasa, bahasa daerah, era disrupsi*

ABSTRACT

Language are dynamis and always develop according to the times. In the era of industrial revolution many changes in several parts and aspects of life such as social, political, economic, cultural and linguistic. The era of the industrial revolution was followed by an era of disruption, namely shifts in activities from manual to automatic robots. This paper focuses on the disruption of language with conditions in Indonesia. In its development, Indonesia is one of the countries included in the Endoglossic category that applies one language as the national language and the official language of the pengantar in all activities, namely Indonesian. Language disruption can be seen as progress and can also be seen as an inevitable influence of language interference. In the field of art, many Javanese songs began to be known throughout Indonesia through television and youtube so that those from other regions deliberately searched for the meaning of the song. In the world of politics, can be seen during the campaign, candidates for legislative members from the regions make

their jargon use their respective regional languages. In the field of transportation, regional language guides are also provided. Another example in the culinary business, each region uses their own regional sentences which are usually popularized by public figures known by the public. Language disruption will be a form of negative impact if it affects the retention of regional languages and national languages which are feared to be abandoned by the users. Language disruption must be addressed in a balanced manner so as not to affect the ecology of the language.

Keywords: *language existence, disruption era, regional language*

PENDAHULUAN

Perkembangan bahasa yang sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman menyebabkan perubahan-perubahan di beberapa aspek kehidupan. Bahasa menjadi sangat penting dalam fungsinya sebagai alat komunikasi di era revolusi industri. Perdagangan bebas, arus ekspor-impor adalah contoh bentuk globalisasi yang masuk ke Indonesia. Arus globalisasi yang juga masuk ke Indonesia adalah bahasa dan budaya. Bahasa asing yang masuk ke Indonesia memang bukan hal yang baru. Sejak zaman colonial dan post-kolonial Indonesia sudah mengenal bahasa lain selain bahasanya sendiri. Bahasa Hindia-Belanda saat dijajah oleh Belanda, bahasa Jepang saat zaman penjajahan, dan bahasa Melayuyang memang menjadi bahasa yang digunakan penduduk Indonesia pada masa itu. Bukti bahwa penduduk Indonesia menggunakan bahasa Melayu adalah banyak ditemukan prasasti-prasasti yang berbahasa Melayu, selain itu bahasa Melayu juga digunakan saat melakukan transaksi dagang pada masa itu. Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa nasional pada Oktober 1928.

Bahasa Indonesia bersifat egaliter dan terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dari bahasa asing lain. Kosakata yang ada di Indonesia tidak sedikit yang berasal dari kata serapan bahasa asing seperti Belanda, Inggris, dan Arab yang tentu saja penulisannya disesuaikan dengan ejaan dan ucapan bahasa Indonesia. Proses-proses masuknya bahasa asing ke Indonesia yang semakin berkembang menjadi bahasa lain yang digunakan secara aktif belum dapat dikatakan sebagai sebuah kategori bahwa Indonesia adalah suatu Negara *exoglossic* yang menerapkan bahasa lain sebagai bahasa resmi nasional. Indonesia tetap mengakui bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan atau bahasa nasional sesuai peraturan perundang-

undangan. Realita yang ada saat ini di Indonesia bahasa asing menjadi begitu eksis dan dianggap lebih prestisius. Dapat dikatakan bahasa Indonesia menduduki peringkat kedua dilihat dari segi ekonomi. Sebagai contoh, untuk persyaratan pendaftaran, bukti kemampuan berbahasa Inggris selalu menjadi syarat prosdural, sedangkan bukti kemampuan berbahasa Indonesia tidak diutamakan. Kebijakan *exoglossic* dan *endoglossic* memiliki pengaruhnya masing-masing dan memiliki sisi positif dan negatif. Di satu sisi *exoglossic* dibutuhkan dalam upaya pengembangan suatu Negara dalam menghadapi era global, sedangkan kebijakan *endoglossic* berupaya untuk melindungi bahasa pribumi atau bahasa lokal dari kepunahan sehingga dapat menghilangkan identitas suatu negara.

Disrupsi, jika dilihat dari arti katanya sesuai dengan KBBI artinya adalah yang tercabut dari akarnya. Berdasarkan pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan fenomena zaman sekarang adalah banyak hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri, era disrupsi telah mengharuskan setiap orang memiliki kemampuann yang dapat menyeimbangkan dengan pergeseran-pergeseran aktivitas dari yang bersifat manual beralih ke “robot” yang serba mesin. Sebelumnya, belajar hanya berfokus pada buku tebal yang harus dibaca, sekarang mencari informasi dapat langsung ke mesin pencari seperti google dengan cepat informasi yang diinginkan dapat diperoleh. Generasi milenial saat ini membaca gawai bukan membaca buku karena di gawainya lebih lengkap. Industri surat kabar pun mengalami penurunan skala bisnis yang cukup signifikan, karena tak bisa bisa menghindari dampak dari pesatnya pertumbuhan media *online*. Beberapa ilustrasi ini menggambarkan perubahan yang muncul akibat digitalisasi dan otomasi dalam era Industri 4.0 sekarang ini. Perubahan-perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman.

Negara berkembang dapat dicirikan dengan penggunaan multibahasa oleh setiap etnis untuk berkomunikasi. Negara-negara semacam ini menghadapi tantangan khusus dalam hal kebijakan terkait penggunaan bahasa resmi sehingga akan muncul istilah bahasa mayoritas dan bahasa minoritas (Chumbow, 2005:167). Berdasarkan istilah bahasa mayoritas dan minoritas ini, maka kebijakan dalam pemerintahan perlu mempertimbangkan bahasa yang dipilih dalam pengantar dan bahasa nasional atau bahasa resmi. Bahasa mayoritas dan bahasa minoritas dapat dibedakan berdasarkan

angka penutur atau jumlah pengguna dan usia penutur (Tollefson, 2002:422)). Munculnya istilah bahasa mayoritas dan minoritas ini memunculkan komunitas pengguna bahasa yang akan membuat perbedaan dalam hal kebudayaan, sosial, ekonomi, gaya hidup, dan juga dimensi politik bagi negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dan uraian yang konseptual terhadap fenomena yang muncul. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi dan studi pustaka tentang penggunaan dan eksistensi bahasa daerah di tengah era disrupsi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang menjelaskan hasil observasi dan pustaka yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dikaitkan dengan kondisi realistik. Sumber data dalam penelitian ini adalah lingkungan sekitar dan media sosial yang diamati penggunaan bahasanya. Data dalam penelitian ini adalah bahasa yang digunakan oleh subjek-subjek di lingkungan sekitar dan bahasa yang digunakan di media sosial.

PEMBAHASAN

Era disrupsi juga berpengaruh terhadap bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Bahasa Indonesia terdampak disrupsi dari dua arah yakni dari bahasa daerah dan bahasa asing. Era disrupsi membawa pengaruh positif dan juga negative terhadap bahasa. Jika disikapi dengan pikiran terbuka, disrupsi bahasa akan dianggap sebagai kemajuan dalam perkembangan bahasa karena menyadari bahwa dunia tidak dapat mengelak dari arus globalisasi. Gawai dan mesin-mesin banyak yang menggunakan bahasa asing sehingga para penggunanya diharuskan mengerti. Misal dalam mesin, bahasa yang digunakan sebagai standar operasional penggunaan adalah bahasa Inggris, maka pengguna harus paham langkah-langkahnya. Gawai yang digunakan oleh pemuda dan anak-anak baik sebagai *game* ataupun sarana belajar sudah banyak menggunakan bahasa asing. Sebagai contoh, anak usia 4 tahun yang belum bisa membaca, bermain *game* di *smartphone* tetap bisa mengoperasikan

meskipun berbahasa asing. Hal demikian terjadi karena anak terbiasa menggunakan dan anak hafal jika ia menekan tombol itu, permainan akan bisa dimulai.

Contoh lain adalah penggunaan bahasa daerah di beberapa tempat di Indonesia bahkan di luar negeri, hal tersebut menandakan bahwa meskipun memasuki era revolusi industry, eksistensi bahasa daerah masih terjaga. Di Bandara Internasional Dubai, sejumlah penumpang terpingkal ketika mendengar informasi penerbangan yang menggunakan bahasa Jawa halus. "*Nuwun sewu, bapak-bapak soho ibu-ibu, penerbangan Emirates EK tigo-gangsal-wolu dateng Jakarta sak meniko bade ...*," begitu bunyi pengumuman penerbangan EK 358 rute Dubai-Jakarta di Bandara Dubai - bandara internasional tersibuk di dunia. Ini adalah Bahasa Jawa halus, yang dalam bahasa Indonesia berarti 'permisi bapak-bapak dan ibu-ibu, penerbangan EK 358 ke Jakarta saat ini akan....' Alasan bahasa tersebut dipakai, menurut Divisional Vice President dari Emirates, Walter Riggans, untuk memudahkan bagi penumpang yang tidak memahami bahasa Inggris atau Arab saat proses naik ke pesawat.

Contoh lain adalah lagu-lagu berbahasa daerah yang mulia terkanl dan sering ditonton di *Youtube* adalah lagu berbahasa Jawa yang dipopulerkan oleh penyanyi asal Surabaya Via Vallen. Videonya yang banyak menyanyikan lagu campuran bahasa Indonesia dan Jawa telah ditonton sebanyak jutaan kali baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Orang asing tahu video tersebut dari *chanel youtube* atau dunia maya. Hal ini merupakan fenomena disruptsi.

Terbaikannya pengutamaan bahasa daerah di ruang publik seolah-olah mengonfirmasi bahwa sekat-sekat geografis negara Indonesia dengan negara lain dan tanda-tanda kekhasan identitas bangsa ini telah runtuh. Karena itu, misalnya, di kalangan masyarakat terasa tidak asing lagi bentuk bahasa seperti *e-money*, *e-banking*, dan *e-toll*. Kemudian ada, *welcome to Batam*, bukan selamat datang di Batam, begitu banyak kata *city* di negara kita, contoh-contoh seperti itulah yang kini kerap ditemui," paparnya.

Kecenderungan penggunaan Bahasa Indonesia melalui media sosial lebih sebagai alat pengungkap kesenangan pada hal instan dan kebiasaan merumpikan SARA daripada sebagai etos pengembangan literasi baca tulis secara komprehensif. Tantangan itu menurutnya makin besar pada era Revolusi Industri 4.0 ini. Selain itu kondisi bahasa daerah saat ini cukup mengkhawatirkan seperti yang dilansir oleh data

Unesco melalui laman Liputan 6.com bahwa Indonesia merupakan Negara edua yang memiliki bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Jumlah bahasa daerah Indonesia tergolong terbanyak karena terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Misal di Madura yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Madura memiliki beragamkosa kata yang berbeda. Untuk mengatakan ngantuk di Bangkalan ngantok sedangkan di Sumenep katondu. Data berikutnya adalah Indonesia memiliki sekitar 700 bahasa daerah, sampai tahun 2016 sebanyak 646 bahasa daerah telah didokumentasikan oleh Badan Bahasa, 67 bahasa daerah telah dipetakan vitalitasnya oleh badan bahasa, dan 11 bahasa daerah dinyatakan punah Badan Bahasa.

Bahasa daerah nyaris punah disebabkan oleh jumlah penutur yang menyusut dan berkurang, bencana besar yang menyebabkan kematian di suatu wilayah, kawin campur antarsuku, letak geografis suatu daerah tidak menguntungkan, dan sikap masyarakat yang negative terhadap bahasa daerah. Di era disrupsi bahasa daerah dianggap hampir tersisihkan, meskipun pada kenyataannya bahasa daerah masih tetap digunakan di daerah masing-masing. Untuk dapat menangani hal tersebut perlu kebijakan bahasa di Indonesia untuk dapat meredakan arus era disrupsi. Umumnya, implementasi kebijakan bahasa didelegasikan melalui sistem pendidikan formal dan nonformal nasional kependidikan di tingkat regional dan lokal. Namun dalam beberapa kasus alokasi personil, materi, dan keuangan untuk menerapkan tujuan kultivasi bahasa mungkin tidak merata dan tidak konsisten. Misalnya, guru ditugaskan ke program pendidikan bilingual mungkin tidak memiliki pelatihan atau keterampilan bahasa yang memadai di kedua bahasa yang digunakan. Atau, materi pedagogis dan promosi yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan tersebut mungkin tidak tersedia secara lokal. Dalam kasus lain, lokal administrator pendidikan mungkin tidak sadar atau sesuai dengan kebijakan bahasa dan dengan demikian dapat menghambat penerapannya (Hasselbring, 2006). Dalam kasus ini, perspektif lokal tentang kebijakan bahasa mengasumsikan peran yang sangat penting. Pemimpin masyarakat lokal perlu menyadari masalah bahasa, opsi kebijakan yang tersedia, biaya dan manfaat dari opsi-opsi itu. Dalam hal ini konsultan dari organisasi di luar komunitas (apakah nasional atau internasional) dapat memainkan peran signifikan dalam menyediakan akses ke informasi dan keahlian yang dibutuhkan. Sebagai contoh

perbandingan eksistensi bahasa Jawa dan bahasa Madura memiliki perbedaan. Penggunaan bahasa Jawa di ruang public masih dalam rata-rata aktif, misalnya komunikasi mahasiswa dan dosen atau komunikasi antara sesama dosen di WA, masih menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Madura di ruang public masih rendah bahkan cenderung menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi melalui WA. Penggunaan bahasa Jawa dapat dilihat dalam contoh berikut ini:



Pada gambar tersebut terlihat bahwa komunikasinya menggunakan bahasa Jawa. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi bahasa Jawa masih tinggi dibandingkan dengan bahasa Madura. Perlindungan terhadap bahasa daerah bukan hanya harus dilakukan oleh pemerintah melalui aturan perundang-undangan, tetapi dapat dilakukan oleh setiap individu dengan aktif menggunakan bahasa daerahnya di berbagai kesempatan yang memungkinkan penggunaan bahasa daerah dan dalam situasi yang bahasanya dapat dipahami oleh semua orang, maka dapat diusahakan menggunakan bahasa daerah sebagai bentuk pelestarian.

Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan

mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. Selain itu, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kebebasan yang diberikan UUD 1945 bukan berarti kebebasan yang tanpa pembatasan karena hingga pada batas tertentu pengembangan dan penggunaan bahasa daerah pasti akan berbenturan dengan ketentuan lain. Untuk keperluan bernegara, kebebasan penggunaan bahasa daerah yang diamanatkan itu akan terbentur dengan batas penggunaan bahasa negara (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa>).

Untuk menjamin hubungan harmonis masyarakat Indonesia atas penggunaan bahasanya, Pasal 36C UUD 1945 mengamanatkan bahwa perihal bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus diatur dalam sebuah undang-undang. Amanat pasal itulah yang melahirkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Khusus tentang bahasa negara, pengaturannya dituangkan dalam Bab III, mulai Pasal 25 sampai dengan Pasal 45 dalam undang-undang tersebut. Ibarat sisi mata uang, pengaturan tentang bahasa negara, tentu berkaitan dengan pengaturan bahasa yang bukan bahasa negara, yang dalam hal itu berupa bahasa daerah dan bahasa asing (Badan Bahasa, 2018)

Upaya pengembangan, pembinaan, dan pelestarian bahasa dilakukan terhadap objek bahasa dan sastra berdasarkan kondisi atau vitalitasnya. Pada tahun 2002 dan 2003, UNESCO dengan bantuan kelompok linguis internasional menetapkan kerangka untuk menentukan vitalitas bahasa untuk membantu pemerintah membuat kebijakan penanganan bahasa di negaranya. Kelompok itu menetapkan sembilan kriteria untuk mengukur vitalitas bahasa. Kesembilan faktor yang dijadikan kriteria vitalitas suatu bahasa adalah jumlah penutur, proporsi penutur dalam populasi total, ketersediaan bahan ajar, respons bahasa terhadap media baru, tipe dan kualitas dokumentasi, sikap bahasa dan kebijakan pemerintah dan institusi, peralihan ranah penggunaan bahasa, sikap anggota komunitas terhadap bahasanya, serta transmisi bahasa antargenerasi. Berdasarkan kriteria itu, vitalitas bahasa digolongkan menjadi enam kelompok (baca Salminen, 1999), yaitu

1. bahasa yang punah (*extinct languages*), bahasa tanpa penutur lagi;

2. bahasa hampir punah (*nearly extinct languages*), bahasa dengan sebayak-banyaknya sepuluh penutur yang semuanya generasi tua;
3. bahasa yang sangat terancam (*seriously endangered languages*), bahasa dengan jumlah penutur yang masih banyak, tetapi anak-anak mereka sudah tidak menggunakan bahasa itu;
4. bahasa terancam (*endangered languages*), bahasa dengan penutur anak-anak, tetapi cenderung menurun;
5. bahasa yang potensial terancam (*potentially endangered languages*) bahasa dengan banyak penutur anak-anak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau yang prestisius;
6. bahasa yang tidak terancam (*not endangered languages*), bahasa yang memiliki transmisi ke generasi baru yang sangat bagus.

Penanganan bahasa daerah diklasifikan berdasarkan pengelompokan vitalitas bahasa tersebut. Pengembangan dan pembinaan dilakukan terhadap bahasa masih dalam status tidak terancam (aman), yaitu bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua hampir terdapat dalam semua ranah, dan terhadap bahasa yang mempunyai potensi terancam, yaitu bahasa yang penutur anak-anaknya masih banyak, tetapi bahasa itu tidak memiliki status resmi atau status yang prestisius. Bahasa dalam vitalitas kedua itu masih dapat direvitalisasi. Dengan pengembangan bahasa itu, kita akan mempunyai korpus yang memadai untuk membahasakan apa saja, mempunyai akselerasi yang bagus terhadap dunia pendidikan dan perkembangan iptek, serta dapat mengantisipasi munculnya media baru. Pembinaan dilakukan agar bahasa itu mempunyai transmisi antargenerasi yang baik, baik transmisi melalui dunia pendidikan maupun transmisi melalui interaksi dalam ranah keluarga. Termasuk dalam upaya pengembangan dan perlindungan adalah memantapkan status bahasa, mengoptimalkan dokumentasi, serta menumbuhkan sikap positif penuturnya (Alwasilah, 2001).

DAFTAR RUJUKAN

- Dennis. 2001. *Motivation in Language Planning and Language Policy*. Clevedon:UK: Multilingual Matters.
- Alwasilah. 2010. *Filsafat dan Kebijakan Bahasa*. Bandung: Rosdakarya
- Breton, Roland J. L. & Fohitung, Bikia. 1991.. *Atlas Administratif des Langues Nationales du Cameroun*. Yaounde/Paris: CERDOTOLA and ACCT.
- Chumbow, Beban Sammy. 2005. The Language Question and National Development in Africa. In Thandika Mkandawire (ed.), *African Intellectuals: Rethinking Politics*,
- Constitue. Wikipedia. The Comparative Constitutions Project (CCP) (dalam bahasa bahasa Inggris)*. Diakses tanggal 28-03-201.
- Cooper, Robert L. 1989. *Language Planning and Social Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garvin, Paul & Mathiot, Madeleine. 1956. The urbanization of the Guarani language.
- Hasselbring, Sue Ann. 2006. Cross-Dialectal Acceptance of Written Standards:
- Holmes, Janet. 2013. *An Introduction to Sociolinguistic*. New York: Roulledge https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_resmi#cite_note-1. Diakses 8 September 2018
- Hornberger, Nancy H. (1987). Bilingual education success, but policy failure. *Language in Society*, 16, 205–226.
- Language, Gender and Development* (pp. 165–192). Dakar/London: Codesria and Zed Books.
- Lewis, Paull, Trudel, Barbara. *The Handbook of Educational Linguistics*. 2007. Australia: Blackwell Publishing
- Lodhi, Abdulaziz Y. (1993). The language situation in Africa today. *Nordic Journal of African Studies*, 2(1), 79–86.
- Moeliono, Anton M. 2011. “Kebijakan Bahasa dan Perencanaan Bahasa di Indonesia: Kendala dan Tantangan”. *Perencanaan Bahasa pada Abad Ke-21: Kendala dan Tantangan*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta
- Nettle, Daniel (1999). *Linguistic Diversity*. Oxford: Oxford University Press.
- Salminen, Tapani. 1999. *Unesco Red Book On Endangered Languages: Europe*. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html#state. Diakses 10 September 2018

- Sneddon, J.N. 2003. *The Indonesia Language: its History and Role in Modern Society*. Australia: University of South Wales
- Stroud, Christopher (2001). African mother-tongue programmes and the politics of language: linguistic citizenship versus linguistic human rights. 2001. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*, 22:(4), 339–355.
- Sugiyono. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/pelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan>. Diakses 11 September 2018.
- Tollefson, James. 2002. Limitations of language policy and planning. In Robert Kaplan Two Ghanaian Case Studies. Doctoral dissertation, Department of Linguistics, University of South Africa. UK: Multilingual Matters.
- UNESCO. *A methodology for assessing language vitality and endangerment*. <http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/language-vitality/#topPage>. Diakses 10 September 2018